

Kajian literatur atas pasal-pasal kontroversial dalam perpres nomor 70 tahun 2012

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20428411&lokasi=lokal>

Abstrak

dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan diperlukan pelaksanaan belanja negara, dan dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara diperlukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. upaya untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jas pemerintah. peraturan presiden indonesia nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nommor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan perubahan yang menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang/jasa dengan tujuan untk lebih menyederhanakan sistem pengadaan sehingga menjadi mudah dilaksanakan. dalam asas hukum dikenal asas *lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum), dan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama).

upaya pemerintah untuk menyempurnakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah melalui revisi perpres tersebut selayaknya mendapat apresiasi, meskipun masih ditemukan adanya ketidaksempurnaan dalam beberapa pasalnya sehingga menjadi multitafsir